



## BAB VI

### STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Pembangunan pada hakekatnya adalah upaya sistematis dan terencana oleh masing-masing maupun seluruh komponen bangsa untuk mengubah suatu keadaan menjadi keadaan yang lebih baik dengan memanfaatkan berbagai sumber daya yang tersedia secara optimal, efisien, efektif dan akuntabel, dengan tujuan akhir untuk meningkatkan kualitas hidup manusia dan masyarakat secara berkelanjutan. Upaya sistematis dan terencana tadi tentu berisi langkah-langkah strategis, taktis dan praktis, karena masing-masing negara memiliki usia kedaulatan, sumber daya andalan dan tantangan yang berbeda.

Rumusan strategi dan arah kebijakan menunjukkan keinginan yang kuat bagaimana Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Utara dapat menciptakan nilai tambah (*value added*) bagi *stakeholder* pembangunan daerah. Di sini penting untuk mendapatkan parameter utama yang menunjukkan bagaimana strategis tersebut menciptakan nilai (*strategic objective*). Melalui parameter tersebut, dapat dikenali indikasi keberhasilan atau kegagalan suatu strategi sekaligus untuk menciptakan budaya “berpikir strategik” dalam menjamin bahwa transformasi menuju pengelolaan keuangan pemerintah daerah yang lebih baik, transparan, akuntabel dan berkomitmen terhadap kinerja, strategi harus dikendalikan dan dievaluasi (*learning process*).

Berdasarkan amanat Undang-Undang nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah pasal 67 telah ditetapkan bahwa Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten - Kota wajib melaksanakan program strategis nasional. Hal ini mengandung arti bahwa pemerintah daerah Provinsi dan Kabupaten - Kota diwajibkan untuk mempedomani strategi dan arah kebijakan pembangunan pemerintah nasional.

Dalam Peraturan Presiden nomor 2 tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2015-2019 sudah ditetapkan Strategi Pembangunan Nasional yang menggariskan hal-hal sebagai berikut:

1. Norma Pembangunan yang diterapkan dalam RPJMN 2015-2019 adalah sebagai berikut:



- a. Membangun untuk meningkatkan kualitas hidup manusia dan masyarakat.
- b. Setiap upaya meningkatkan kesejahteraan, kemakmuran, produktivitas tidak boleh menciptakan ketimpangan yang makin melebar yang dapat merusak keseimbangan pembangunan. Perhatian khusus kepada peningkatan produktivitas rakyat lapisan menengah-bawah, tanpa menghalangi, menghambat, mengecilkan dan mengurangi keleluasaan pelaku-pelaku besar untuk terus menjadi agen pertumbuhan. Hal ini dimaksudkan untuk menciptakan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.
- c. Aktivitas pembangunan tidak boleh merusak, menurunkan daya dukung lingkungan dan mengganggu keseimbangan ekosistem.

2. Tiga Dimensi Pembangunan;

- a. Dimensi pembangunan manusia dan masyarakat.

Pembangunan dilakukan untuk meningkatkan kualitas manusia dan masyarakat yang menghasilkan manusia-manusia Indonesia unggul dengan meningkatkan kecerdasan otak dan kesehatan fisik melalui pendidikan, kesehatan dan perbaikan gizi. Manusia Indonesia unggul tersebut diharapkan juga mempunyai mental dan karakter yang tangguh dengan perilaku yang positif dan konstruktif. Karena itu pembangunan mental dan karakter menjadi salah satu prioritas utama pembangunan, tidak hanya di birokrasi tetapi juga pada seluruh komponen masyarakat, sehingga akan dihasilkan pengusaha yang kreatif, inovatif, punya etos bisnis dan mau mengambil risiko; pekerja yang berdedikasi, disiplin, kerja keras, taat aturan dan paham terhadap karakter usaha tempatnya bekerja, serta masyarakat yang tertib dan terbuka sebagai modal sosial yang positif bagi pembangunan, serta memberikan rasa aman dan nyaman bagi sesama.

- b. Dimensi pembangunan sektor unggulan dengan prioritas:
  - Kedaulatan pangan. Indonesia mempunyai modal yang cukup untuk memenuhi kedaulatan pangan bagi seluruh rakyat,



sehingga tidak boleh tergantung secara berlebihan kepada negara lain.

- Kedaulatan energi dan ketenagalistrikan. Dilakukan dengan memanfaatkan sebesar-besarnya sumber daya energi (gas, batu-bara, dan tenaga air) dalam negeri.
- Kemaritiman dan kelautan. Kekayaan laut dan maritim Indonesia harus dapat dimanfaatkan secara optimal bagi kepentingan nasional dan kesejahteraan rakyat.
- Pariwisata dan industri. Potensi keindahan alam dan keanekaragaman budaya yang unik merupakan modal untuk pengembangan pariwisata nasional. Sedangkan industri diprioritaskan agar tercipta ekonomi yang berbasis penciptaan nilai tambah dengan muatan iptek, keterampilan, keahlian, dan SDM yang unggul.

c. Dimensi pemerataan dan kewilayahan.

Pembangunan bukan hanya untuk kelompok tertentu, tetapi untuk seluruh masyarakat di seluruh wilayah. Karena itu pembangunan harus dapat menghilangkan/memperkecil kesenjangan yang ada, baik kesenjangan antarkelompok pendapatan, maupun kesenjangan antarwilayah, dengan prioritas:

- Wilayah desa, untuk mengurangi jumlah penduduk miskin, karena penduduk miskin sebagian besar tinggal di desa;
- Kawasan Timur.

3. Kondisi sosial, politik, hukum, dan keamanan yang stabil diperlukan sebagai prasyarat pembangunan yang berkualitas. Kondisi perlu tersebut antara lain:

- a. Kepastian dan penegakan hukum;
- b. Keamanan dan ketertiban;
- c. Politik dan demokrasi; dan
- d. Tetakelola dan reformasi birokrasi.



4. *Quickwins* (hasil pembangunan yang dapat segera dilihat hasilnya). Pembangunan merupakan proses yang terus menerus dan membutuhkan waktu yang lama. Karena itu dibutuhkan output cepat yang dapat dijadikan contoh dan acuan masyarakat tentang arah pembangunan yang sedang berjalan, sekaligus untuk meningkatkan motivasi dan partisipasi masyarakat.

Selanjutnya dalam Perpres 2 tahun 2015 tersebut juga disebutkan bahwa mengacu pada sasaran utama serta analisis yang hendak dicapai dalam pembangunan nasional 2014-2019 serta mempertimbangkan lingkungan strategis dan tantangan-tantangan yang akan dihadapi bangsa Indonesia ke depan, maka arah kebijakan umum pembangunan nasional 2015-2019 adalah:

**a) Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan.**

Pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi dan berkelanjutan merupakan landasan utama untuk mempersiapkan Indonesia lepas dari posisi sebagai negara berpendapatan menengah menjadi negara maju. Pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan ditandai dengan terjadinya transformasi ekonomi melalui penguatan pertanian dan pertambangan, berkembangnya industri manufaktur di berbagai wilayah, modernisasi sector jasa, penguasaan iptek dan berkembangnya inovasi, terjaganya kesinambungan fiskal, meningkatnya daya saing produk ekspor non migas terutama produk manufaktur dan jasa, meningkatnya daya saing dan peran UMKM dan koperasi, serta meningkatnya ketersediaan lapangan kerja dan kesempatan kerja yang berkualitas.

**b) Meningkatkan Pengelolaan dan Nilai Tambah Sumber Daya Alam (SDA) Yang Berkelanjutan.**

Arah kebijakan peningkatan pengelolaan dan nilai tambah SDA adalah dengan meningkatkan kapasitas produksi melalui peningkatan produktivitas dan perluasan areal pertanian, meningkatkan daya saing dan nilai tambah komoditi pertanian dan perikanan, mengoptimalkan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya mineral dan tambang lainnya, meningkatkan produksi dan ragam bauran sumber daya energi, meningkatkan efisiensi dan pemerataan dalam pemanfaatan energi, mengembangkan ekonomi



kelautan yang terintegrasi antarsektor dan antarwilayah, dan meningkatnya efektivitas pengelolaan dan pemanfaatan keragaman hayati Indonesia yang sangat kaya.

- c) Mempercepat pembangunan infrastruktur untuk pertumbuhan dan pemerataan.** Pembangunan infrastruktur diarahkan untuk memperkuat konektivitas nasional untuk mencapai keseimbangan pembangunan, mempercepat penyediaan infrastruktur dasar (perumahan, air bersih, sanitasi, dan listrik), menjamin ketahanan air, pangan dan energi untuk mendukung ketahanan nasional, dan mengembangkan sistem transportasi massal perkotaan, yang kesemuanya dilaksanakan secara terintegrasi dan dengan meningkatkan peran kerjasama Pemerintah-Swasta.
- d) Peningkatan kualitas lingkungan hidup, Mitigasi bencana alam dan perubahan iklim.** Arah kebijakan peningkatan kualitas lingkungan hidup, mitigasi bencana dan perubahan iklim adalah melalui peningkatan pemantauan kualitas lingkungan dan penegakan hukum pencemaran lingkungan hidup; mengurangi risiko bencana, meningkatkan ketangguhan pemerintah dan masyarakat terhadap bencana, dan memperkuat kapasitas mitigasi dan adaptasi perubahan iklim.
- e) Penyiapan Landasan Pembangunan yang Kokoh.** Landasan pembangunan yang kokoh dicirikan oleh meningkatnya kualitas pelayanan publik yang didukung oleh birokrasi yang bersih, transparan, efektif dan efisien; meningkatnya kualitas penegakan hukum dan efektivitas pencegahan dan pemberantasan korupsi, semakin mantapnya konsolidasi demokrasi, semakin tangguhnya kapasitas penjagaan pertahanan dan stabilitas keamanan nasional, dan meningkatnya peran kepemimpinan dan kualitas partisipasi Indonesia dalam forum internasional.
- f) Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Kesejahteraan Rakyat Yang Berkeadilan.** Sumberdaya manusia yang berkualitas tercermin dari meningkatnya akses pendidikan yang



berkualitas pada semua jenjang pendidikan dengan memberikan perhatian lebih pada penduduk miskin dan daerah 3T; meningkatnya kompetensi siswa Indonesia dalam Bidang Matematika, Sains dan Literasi; meningkatnya akses dan kualitas pelayanan kesehatan, terutama kepada para ibu, anak, remaja dan lansia; meningkatnya pelayanan gizi masyarakat yang berkualitas, meningkatnya efektivitas pencegahan dan pengendalian penyakit dan penyehatan lingkungan, serta berkembangnya jaminan kesehatan.

**g) Mengembangkan dan Memeratakan Pembangunan Daerah.**

Pembangunan daerah diarahkan untuk menjaga momentum pertumbuhan wilayah dengan meningkatkan kinerja pusat-pusat pertumbuhan wilayah di Sulawesi menjamin pemenuhan pelayanan dasar di seluruh wilayah bagi seluruh lapisan masyarakat; mempercepat pembangunan daerah tertinggal dan kawasan perbatasan, membangun kawasan perkotaan dan perdesaan; mempercepat penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah; dan mengoptimalkan pelaksanaan desentralisasi dan otonomi daerah.

Dengan berpedoman pada strategi dan arah kebijakan nasional serta visi, misi, dan tujuan, serta sasaran pembangunan Bupati dan Wakil Bupati Minahasa Selatan maka upaya pencapaiannya kemudian dijabarkan secara lebih sistematis melalui perumusan strategi dan arah kebijakan.

Strategi dan arah kebijakan yang menjadi penekanan pembangunan dalam RPJMD Kabupaten Minahasa Selatan adalah Koordinasi penguatan kebijakan desentralisasi dan otonomi daerah yang diatur dalam UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Undang-Undang ini telah mengatur sistem pemerintahan daerah yang memiliki hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat Minahasa Selatan. Kunci keberhasilan dalam implementasi kebijakan desentralisasi dan otonomi daerah adalah peningkatan kapasitas kelembagaan, aparatur, dan keuangan pemerintah daerah Kabupaten Minahasa Selatan.

Pada prinsipnya strategi dan kebijakan pembangunan diarahkan untuk



mencapai pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi secara berkelanjutan memberikan kesempatan pada peningkatan dan perluasan kegiatan ekonomi yang pada gilirannya akan memberikan peluang pada peningkatan pendapatan masyarakat. Oleh sebab itu, diperlukan penciptaan stabilitas ekonomi yang kokoh agar kegiatan ekonomi yang mendorong peningkatan pertumbuhan ekonomi dapat berjalan dengan lancar. Terciptanya stabilitas ekonomi yang kokoh juga akan melindungi masyarakat dari penurunan daya beli karena kenaikan harga. Dengan demikian, pertumbuhan ekonomi dan stabilitas ekonomi memegang peranan yang sangat penting dalam peningkatan kesejahteraan rakyat.

Agar peningkatan kesejahteraan masyarakat dapat terwujud, diperlukan berbagai upaya yang mendorong peran serta masyarakat dalam berbagai kegiatan yang mendorong perekonomian ke arah yang lebih maju. Selain itu diperlukan pula berbagai upaya agar semua masyarakat dapat menikmati kemajuan ekonomi yang terjadi secara berkeadilan. Dengan demikian tujuan untuk memajukan perekonomian yang mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat akan tercapai.

Di sektor investasi, penguatan investasi ditempuh melalui kebijakan yaitu Peningkatan Iklim Investasi dan dan Iklim Usaha untuk meningkatkan efisiensi proses perijinan bisnis; dan Peningkatan Investasi yang inklusif terutama dari investor domestik. Arah kebijakan yang ditempuh adalah menciptakan iklim investasi dan iklim usaha yang lebih berdaya saing yang dapat meningkatkan efisiensi proses perijinan, meningkatkan kepastian berinvestasi dan berusaha, serta mendorong persaingan usaha yang lebih sehat dan berkeadilan.

Untuk mendorong terciptanya kesempatan kerja di Minahasa Selatan maka akan dilakukan peningkatan produktivitas dengan melakukan akselerasi penyerapan tenaga kerja ke industri yang mempunyai nilai tambah dan produktivitas tinggi termasuk industri pertanian yang merupakan pemberi kesempatan kerja besar serta industri pengolahan yang mempunyai potensi dapat menggerakkan pertumbuhan, menciptakan kesempatan kerja dan membawa perbaikan pada kesejahteraan hidup. Di Minahasa Selatan, industri pengolahan seperti agroindustri untuk komoditi kelapa dan turunannya, komoditi jagung, komoditi perikanan cukup signifikan memberikan kontribusi bagi peningkatan ekonomi masyarakat.



Transformasi struktur tenaga kerja di Minahasa Selatan dilakukan dengan mempersiapkan infrastruktur pengembangan kompetensi pekerja untuk mengubah *low-skilled industries* menjadi *skills-based industries*. Pemerintah Kabupaten Minahasa Selatan akan memberikan kemudahan bagi investasi yang menciptakan kesempatan kerja besar (padat pekerja) dan bagi pelaku usaha kecil-menengah. Keseimbangan dalam penciptaan lapangan kerja dan perlindungan pekerja yang memadai akan tercapai bila pertumbuhan ekonomi yang tercipta dapat memberikan kesempatan kerja yang baik dan tingkat pendapatan pekerja lebih besar dan lebih merata dalam sektor-sektor pembangunan. Di Kabupaten Minahasa Selatan, akan diupayakan agar dilaksanakan langkah-langkah konkret untuk pertumbuhan dan kemajuan sosial ekonomi masyarakat serta perubahan struktur perekonomian memiliki dua konsekuensi penting yaitu; pertama, penduduk golongan menengah ke bawah akan semakin membutuhkan sistem perlindungan sosial yang komprehensif; dan kedua, adanya potensi meningkatnya kesenjangan antarkelompok berpendapatan terbawah dan menengah ke atas yang menjadikan masalah kemiskinan semakin kompleks.

Perlindungan sosial diperlukan agar penduduk yang kurang mampu terlindungi pemenuhan kebutuhannya, terutama pelayanan kesehatan dan kebutuhan bahan pokok, apabila terjadi guncangan ekonomi maupun guncangan sosial yang terjadi. Dalam mengurangi kesenjangan antar kelompok ekonomi di wilayah kabupaten Minahasa Selatan, perluasan akses terhadap pemanfaatan pelayanan dasar perlu dilakukan. Sementara itu, untuk mengatasi kompleksitas permasalahan kemiskinan dibutuhkan pembekalan terhadap penduduk kurang mampu dan rentan berupa keterampilan wirausaha maupun keterampilan teknis sehingga dapat meningkatkan daya saing mereka dalam kegiatan ekonomi produktif.

Keterkaitan antara pusat pertumbuhan wilayah dan daerah sekitarnya, perlu difasilitasi dengan infrastruktur wilayah yang terintegrasi dan terhubung dengan baik dan terpadu, khususnya infrastruktur jalan dan perhubungan, perhubungan laut termasuk jaringan informasi dan komunikasi, serta pasokan energi, sehingga tercipta konektivitas baik secara domestik maupun secara internasional (*locally integrated, internationally connected*).





Prioritas khusus akan diberikan pada peningkatan fungsi dan peran perhubungan laut untuk mewujudkan poros maritim dunia mencapai sasaran tingkat pertumbuhan ekonomi dan penurunan tingkat kemiskinan. Dengan demikian pembangunan Pelabuhan Amurang menjadi salahsatu kegiatan strategis dalam pembangunan Minahasa Selatan.

Upaya peningkatan pembangunan ekonomi di semua pusat pertumbuhan wilayah seperti kawasan Turangga, harus tetap mengacu Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) sebagai pedoman untuk menjaga keseimbangan alam dan kelangsungan keserasian ekosistem dan lingkungan sekitarnya. Dengan demikian, diharapkan dapat diciptakan pertumbuhan yang inklusif yang dapat menjangkau seluruh wilayah dan masyarakat dengan tetap menjaga keberlanjutan di masa depan.

Mengingat Kabupaten Minahasa Selatan termasuk salah satu kabupaten yang memiliki indeks resiko bencana tinggi, maka upaya mitigasi iklim dan penanggulangan bencana menjadi hal yang prioritas. Pengurangan risiko bencana merupakan bagian integral pembangunan berkelanjutan, melalui pemahaman tentang risiko bencana dan kerentanan terhadap bencana yang dituangkan dalam perencanaan pembangunan. Faktor “risiko” dalam penanggulangan bencana merupakan fungsi dari ancaman, kerentanan (sosial, fisik, ekonomi, ekologi) dan kapasitas pengelolaan risiko bencana. Tujuan pengarusutamaan pengurangan risiko bencana adalah membangun koordinasi dan sinergi lintas sektor bidang pembangunan dalam meningkatkan ketangguhan menghadapi bencana, yang diharapkan menimbulkan *multiplier effect* bagi pencapaian komitmen global dalam SDGs. Sasaran penanggulangan bencana dalam pembangunan adalah mengurangi risiko korban jiwa dan dampak kerugian akibat bencana dan meningkatkan ketangguhan masyarakat menghadapi bencana, yang diwujudkan dengan meningkatnya kapasitas kelembagaan penyelenggaraan penanggulangan bencana di daerah; terlaksananya integrasi dan/atau pengarusutamaan pengurangan risiko bencana dalam perencanaan pembangunan, tersedianya sarana dan prasarana mitigasi dan kesiapsiagaan menghadapi bencana di kawasan rawan bencana tsunami, gempa bumi, letusan gunung api, banjir, banjir bandang, tanah longsor, kebakaran hutan dan lahan; meningkatnya pengetahuan masyarakat serta terbangunnya budaya kesadaran dalam masyarakat dalam



pengurangan risiko bencana; meningkatnya partisipasi dan peran serta multi-pihak (pemerintah, organisasi non-pemerintah lokal dan internasional, lembaga usaha, perguruan tinggi, media dan masyarakat) dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana;

Pembangunan sumberdaya manusia dilakukan pada seluruh siklus hidup manusia sejak janin dalam kandungan sampai lanjut usia yang pada hakekatnya adalah membangun manusia sebagai sumberdaya pembangunan yang produktif dan berdaya saing, serta sebagai insan dan anggota masyarakat yang dapat hidup secara rukun, damai, gotong royong, patuh pada hukum, dan aktif dalam bermasyarakat. Dengan memperhatikan keberagaman masyarakat, dilihat dari latar belakang sosial ekonomi, budaya, dan geografi, pembangunan manusia dilakukan secara kohesif dan inklusif sehingga manfaatnya dapat dirasakan oleh seluruh komponen masyarakat, tanpa membedakan latar belakang mereka. Oleh karena itu kebijakan dan program yang dilaksanakan harus dimaknai sebagai upaya untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat Minahasa Selatan secara berkeadilan. Upaya meningkatkan kualitas hidup manusia di Minahasa Selatan dilaksanakan melalui pembangunan kependudukan dan keluarga berencana; (2) pembangunan pendidikan khususnya pelaksanaan Program Wajib belajar Pendidikan Dasar, PAUD dan informal yang berkualitas; (3) pembangunan kesehatan khususnya upaya menurunkan angka kematian ibu, bayi/anak serta penurunann prevalensi penyakit menular dan tidak menular; serta peningkatan kesejahteraan rakyat marjinal melalui pelaksanaan SPM Kabupaten di bidang sosial.

Dari aspek tata kelola pemerintahan yang baik, program dan kegiatan pembangunan akan diarahkan untuk meningkatkan kualitas birokrasi dan tata kelola pemerintahan yang baik dalam mendukung peningkatan daya saing dan kinerja pembangunan di berbagai bidang, yang ditandai dengan: terwujudnya kelembagaan birokrasi yang efektif dan efisien; meningkatkan kapasitas pengelolaan reformasi birokrasi; diimplementasikannya UU Aparatur Sipil Negara secara konsisten pada seluruh instansi pemerintah; dan meningkatnya kualitas pelayanan publik.

Dengan ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, maka secara otomatis akan terjadi perubahan Perangkat



Daerah di kabupaten Minahasa Selatan, yang secara langsung akan mengubah strategi dan arah kebijakan yang harus disesuaikan dengan perangkat daerah yang baru tersebut. Restrukturisasi Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Minahasa Selatan akan disusun agar OPD sesuai dengan beban kerja dan kaya fungsi sehingga efektif dan efisien menjalankan pemerintahan; selain itu akan diatur penataan Kewenangan Antar Tingkat Pemerintahan baik di tingkat Kabupaten maupun Kecamatan sampai ke tingkat desa dan kelurahan. Dengan berubahnya struktur kelembagaan perangkat daerah maka reformasi birokrasi akan kembali bergulir dari aspek kelembagaan. Dengan demikian RPJMD Kabupaten Minahasa Selatan 2016-2021 akan disesuaikan pada saat terbentuknya Peraturan Daerah tentang Perangkat Daerah Kabupaten Minahasa Selatan sebagai tindak lanjut Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 2016. Begitupun saat perkembangan saat ini yang terjadi dalam kehidupan bermasyarakat dengan munculnya aspirasi dari masyarakat yang ada di sebagian wilayah untuk pemekaran kecamatan maupun desa. Aspirasi ini membutuhkan kajian yang didukung oleh aturan-aturan dalam menjawab aspirasi dimaksud.

Strategi dan arah kebijakan berdasarkan masing-masing misi dapat dilihat pada table 6.1. berikut ini